

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pembuka sekaligus pengantar skripsi yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, batasan penulisan dan sistematika penulisan.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Malaysia merupakan negara di Asia Tenggara yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini sekitar 30 juta jiwa, yang terdiri dari 3 bangsa utama yakni Melayu, Cina dan India<sup>1</sup>.

Kemerdekaan Malaya, Pulau Pinang dan Malaka dicapai pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan nama Federasi Malaya. Pada 16 September 1963 sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514 dalam proses dekolonialisasi, Singapura, Sarawak, Borneo Utara atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Sabah berubah menjadi negara bagian dari federasi bentukan baru yang bernama Malaysia. Termasuk dengan Federasi Malaya.

Dalam perjalanan federasi ini kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Singapura pada 1965 karena adanya ketidaksesuaian dengan Perjanjian Pembentukan Malaysia dengan dipicu oleh politik diskriminasi, dan pertikaian

---

<sup>1</sup><https://www.statistics.gov.my/> Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2016 Pukul 14.10 WIB

antar-ras di dalam Insiden 13 Mei pada 1969<sup>2</sup>. Setelah Insiden 13 Mei pada 1969, kebijakan ekonomi baru yang kontroversial yaitu upaya penaikan hasil bagi kue ekonomi bumiputra pribumi, yang menyertakan sebagian besar orang Melayu, tetapi tidak selalu penduduk asli dibandingkan dengan kelompok suku lainnya, diluncurkan oleh Perdana Menteri Abdul Razak. Malaysia sejak saat itu memelihara kesetimbangan politik kesukuan yang lunak, dengan sistem pemerintahan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi dan politik yang menyokong keikutsertaan yang pantas dari semua ras.

Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan yang cepat di penghujung abad ke-20. Di antara tahun 1980-an dan pertengahan 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti dibawah kepemimpinan Dr. Mahatir Mohammad. Pada periode ini Malaysia mengalami lompatan dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur dan industri (terutama bidang komputer dan elektronika rumahan). Pertumbuhan yang cepat pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an telah mengubah Malaysia menjadi negara industri baru<sup>3</sup>. Pada periode ini juga, bentang darat Malaysia berubah dengan tumbuhnya beraneka mega-projek. Projek paling terkemuka adalah Menara Kembar Petronas (sempat menjadi gedung tertinggi di dunia), Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur

---

<sup>2</sup>Mohamad, Ardyan. 2012, *Kemerdekaan Singapura Hasil Bentrok Ras Dengan Malaysia*.  
<http://www.merdeka.com/dunia/kemerdekaan-singapura-hasil-bentrok-ras-dengan-malaysia.html>  
Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2016 Pukul 15.10 WIB

<sup>3</sup>Sudrajat, Ihwan. 2005. *Sindrom Kepercayaan Diri Malaysia*.  
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0503/16/opi03.htm> Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2016  
Pukul 16.20 WIB

(KLIA), Jalan Tol Utara-Selatan, Sirkuit F1 Sepang, *Multimedia Super Corridor* (MSC), bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakun, dan Putrajaya, pusat pemerintahan persekutuan baru. Sampai sekarang, Malaysia merupakan salah satu negara maju dan modern di Asia Tenggara bersama Singapura dan Brunei.

Dibalik kesuksesan dan kemajuan yang diraih oleh Malaysia, terdapat kekhawatiran dari Malaysia mengenai konflik yang terjadi di negara tetangganya Thailand. Konflik yang terjadi di Thailand tepatnya Thailand bagian selatan sudah berlangsung sejak Ayutthaya menginvasi Pattani tahun 1688. Pattani sempat merdeka ketika Ayutthaya diserang Burma namun kembali berada di bawah naungan Siam ketika Dinasti Chakri menginvasi Pattani dan membagi kerajaan Pattani menjadi beberapa provinsi yang terpisah dari Pattani seperti Yala, Satun dan Narrathiwat<sup>4</sup>.

Dibawah pemerintahan Muangthai yang Buddha, sebagai kelompok minoritas, mereka memperoleh perlakuan diskriminatif. Birokrasi negara yang berorientasi Thai-Buddha mengisolasi mereka bukan hanya dalam proses politik tapi juga kultural, agar sesuai dengan kebutuhan integrasi nasional. Upaya itu gagal. Kebijakan lebih keras dijalankan rezim Phibul Songkram pada 1938, yang menekankan asimilasi berbagai budaya minoritas ke budaya monoetnik.

---

<sup>4</sup>Ishii, Yoneo.1998. *The Trade From Southeast Asia: Translations from the Tosen Fusetsu-gaki 1674-1723*. Institute of Southeast Asian Studies: Singapura

Upaya integrasi itu menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Melayu-Muslim Thailand Selatan yang menyebabkan identitas budaya mereka terancam. Mereka juga mengeluhkan marjinalisasi budaya, bahasa, dan ekonomi. Sehingga hal ini memicu munculnya gerakan separatis untuk kemerdekaan Pattani. Pada 1947, Haji Sulong bin Abdul Kadir, kepala Dewan Provinsi Islam Pattani, mempelopori perlawanan terhadap Bangkok. Dia memimpin kampanye petisi penuntutan hak otonomi, bahasa, budaya, dan penerapan hukum Islam. Haji Sulong, bersama beberapa pemimpin agama dan anggota parlemen Muslim, ditangkap, dibebaskan, lalu tidak jelas keberadaannya. Dia menjadi simbol perlawanan etnis Melayu-Muslim terhadap pemerintah Thailand<sup>5</sup>.

Pergolakan yang terjadi hingga sekarang masih terus berlanjut<sup>6</sup>. Kasus seperti pengeboman, penembakan, pembakaran sekolah, dan penculikan, diantaranya bisa dikatakan terjadi hampir setiap hari. Kasus yang terjadi di Thailand Selatan yang selalu di beritakan ini terjadi paling banyak di provinsi Narathiwat, Pattani dan Yala. Dan beberapa kekerasan juga terjadi di beberapa distrik di Songkhla, yang juga didominasi oleh etnis muslim Melayu di beberapa distrik tersebut, juga di Hat Yai yang merupakan daerah penghubung sekaligus kota terbesar di Thailand Selatan. Sampai sekarang konflik Thailand Selatan telah menewaskan lebih dari 6.500 orang<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup>Chiong Liow, Joseph. 2009. *Islam, Education, and Reform in Southern Thailand: Tradition & Transformation*. Institute of Southeast Asian Studies: Singapura

<sup>6</sup>Kompas.com. 2016. *Bom Hantam Sekolah di Thailand Selatan, Bocah Empat Tahun Tewas*. <http://internasional.kompas.com/read/2016/09/06/15011701/bom.hantam.sekolah.di.thailand.selatan.bocah.4.tahun.tewas>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2016 pukul 12.00 WIB

<sup>7</sup>*Ibid.*

Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Thailand terutama dengan provinsi-provinsi di Selatan Thailand. Malaysia memiliki kedekatan sejarah, bahasa, agama dan budaya dengan masyarakat di Selatan Thailand. Hal ini membuat Malaysia mempunyai rasa tanggung jawab moral dan merasa memiliki kepentingan untuk ikut membantu penyelesaian konflik di Selatan Thailand. Selain itu, Malaysia ikut mendapatkan dampak dari konflik ini. Akibat dari konflik yang berkepanjangan banyak warga Pattani yang mengungsi dan mencari suaka ke Malaysia. Hal ini karena jarak geografis yang dekat, yakni perbatasan antara Thailand dengan Malaysia hanya dibatasi oleh daratan. Tidak hanya itu, para separatis yang dicari pemerintah Thailand juga kerap memasuki wilayah Malaysia. Tentu Malaysia khawatir dengan keadaan tersebut.

Malaysia sebagai negara tetangga Thailand dan sebagai negara yang berbatasan langsung dengan wilayah konflik Selatan Thailand mulai terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut pada tahun 1998 ketika Tun Mahathir Muhammad menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia<sup>8</sup>. Dimana pada masa itu pemerintah Thailand dan pemerintah Malaysia melakukan diplomasi untuk mendapatkan jalan yang terbaik untuk perdamaian di Thailand Selatan dan untuk beberapa tahun Thailand Selatan menikmati fase damai<sup>9</sup>. Namun hal tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 2001 konflik kembali memanas.

---

<sup>8</sup>Walker, P. Denis. 2005. *Conflict Between the Thai and Islamic Cultures in Southern Thailand (Pattani) 1945-2005*, University Kebangsaan Malaysia Islamyat (27) 5. Hal. 101

<sup>9</sup>Chalk, Peter. 2008. *The Malay-Muslim Insurgency in Southern Thailand: Understanding the Conflict's Evolving Dynamic*, RAND: National Research Institute

Pada tanggal 30 Agustus 2005 terdapat 131 pelarian masyarakat Muslim Selatan Thailand menyeberangi perbatasan dan masuk ke wilayah Kelantan, Malaysia untuk menghindari konflik di negaranya. Selain itu para separatis tak jarang memasuki wilayah Malaysia untuk menghindari pengejaran dari militer Thailand yang tentu saja hal ini bisa menimbulkan gangguan keamanan bagi Malaysia. Hal ini membuat Malaysia khawatir yang disebabkan karena kedekatan geografis antar kedua negara serta kekhawatiran akan perluasan konflik Pattani ke Malaysia. Pada akhirnya Malaysia memetakan rangkaian upaya untuk mengakhiri ketegangan gerakan separatis di wilayah selatan Thailand. Berbagai macam kunjungan dan upaya di tempuh demi terciptanya perdamaian di wilayah Thailand Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang masalah diatas maka penulis mencoba untuk membuat suatu rumusan masalah, yakni: Bagaimana Peran Malaysia dalam Proses Perdamaian di Thailand Selatan Periode 2005-2016?

## **C. Landasan Teori**

Untuk menganalisa permasalahan diatas, maka tentu diperlukan suatu teori. Teori menggambarkan serangkaian konsep yang membentuk pemahaman menjadi satu, serta berfungsi untuk memberikan hipotesa secara sistematis, disamping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena yang ada. Tanpa menggunakan teori maka, maka fenomena-fenomenanya serta data-data yang ada akan sulit dipahami.

Dalam menganalisa permasalahan mengenai peran Malaysia dalam proses perdamaian di Thailand Selatan periode 2005-2015, penulis menggunakan salah satu teori dalam hubungan internasional yaitu : Teori resolusi konflik.

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak yang bertikai<sup>10</sup>.

Konflik dapat dilatar belakangi oleh banyak hal. Konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal, baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Tentulah kedua belah pihak maupun pihak luar yang menyaksikan menginginkan konflik dapat diakhiri.

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional.

Morton mendefinisikan resolusi konflik sebagai sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik<sup>11</sup>. Jadi, dapat dikatakan resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan upaya penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga

---

<sup>10</sup>Sondole, Dennis. 1993. *Conflict Resolution Theory and Practice: Integration and Application*. Manchester: Manchester University Press. Hal 44.

<sup>11</sup>Alo Liliweri. 2005. *Prasangka & Konflik*. LKIS: Yogyakarta. Hal. 289

perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga baik oleh negara maupun Organisasi Regional maupun Organisasi Internasional.

Konflik Thailand Selatan merupakan konflik bekepanjangan yang disebabkan karena adanya perbedaan dari segi sosial, ekonomi, bahasa, budaya dan agama antara daerah Utara dan Tengah Thailand dengan bagian Selatan Thailand. Beberapa penyelesaian konflik telah dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam menyelesaikan konflik Selatan Thailand seperti penyelesaian konflik secara langsung (negosiasi) antara pemerintah Thailand dengan separatis. Bahkan pada masa pemerintahan Yingluck Shinawatra telah diadakan lima kali perundingan untuk menyelesaikan konflik Selatan Thailand, namun sampai sekarang penyelesaian secara langsung (negosiasi) belum mampu menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu konflik ini beberapa kali diselesaikan dengan menggunakan keterlibatan orang ketiga. Keterlibatan orang ketiga dalam konflik tersebut disebabkan karena penyelesaian secara langsung belum mampu menyelesaikan konflik Thailand Selatan. Beberapa kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu konflik diantaranya<sup>12</sup>:

1. Fasilitator, dimana pihak ketiga berperan sebagai fasilitator untuk penyelesaian suatu konflik. Dimana fasilitator membantu proses komunikasi antar pihak yang berkonflik. Fasilitasi dialog memungkinkan pihak yang berkonflik untuk membagikan pandangan mereka sendiri dan mendengar

---

<sup>12</sup>Fisher, Simon. Jawed Ludin, Steve Williams, Dekha Ibrahim Abdi. Richard Smith. Sue Williams. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: British Council Hal. 113-122

pandangan yang berbeda dari lawannya mengenai perhatian terhadap politik atau sosial. Fasilitator bertujuan untuk menyediakan kesempatan dan suasana dimana pihak yang berkonflik saling berukar pendapat dan saling mendengarkan secara jujur tanpa ada permusuhan agar kesepakatan dan perdamaian tercapai.

2. Mediator, dimana mediator berperan membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Arbitrator, dimana pihak arbitrator berperan untuk mendengarkan argumentasi dari setiap pihak dan memutuskan apa sebaiknya solusi dari konflik yang dipersengketakan.

Berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam penyelesaian suatu konflik diatas, maka Malaysia sebagai pihak ketiga yang ikut terlibat dalam upaya proses perdamaian di Thailand Selatan lebih condong berperan sebagai fasilitator.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan Margono Slamet mendefinisikan peran sebagai suatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat<sup>13</sup>. Malaysia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan wilayah konflik, memiliki kedudukan atau peran sebagai fasilitator dalam proses perdamaian di Thailand Selatan. Dalam perannya sebagai

---

<sup>13</sup>Slamet, Margono. 1985. *Mahasiswa dalam Pembangunan : Peranan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata dalam Pembangunan Pedesaan dan Peubahan Sosial*. Universitas Lampung: Bandar Lampung. Halaman 15.

fasilitator Malaysia berupaya untuk ikut terlibat dalam penyelesaian konflik Thailand Selatan. Upaya tersebut merupakan tindakan maupun usaha dari Malaysia sebagai negara yang berperan sebagai fasilitator dalam proses perdamaian di Thailand Selatan. Upaya itu sendiri menurut KBBI merupakan usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud atau untuk memecahkan masalah.

Malaysia dalam proses perdamaian di Thailand Selatan berperan sebagai fasilitator dan berupaya untuk mencari penyelesaian konflik Thailand Selatan. Hal ini dibuktikan dengan upaya Malaysia untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik untuk berunding menyelesaikan konflik yang ada. Malaysia pun aktif sebagai tuan rumah penyelesaian konflik Thailand Selatan dan perdamaian di Thailand Selatan. Selain itu Perdana Menteri Najib Tun Razak pernah berkunjung ke Pattani sebagai komitmen untuk membantu penyelesaian konflik Thailand Selatan. Malaysia yang berbatasan langsung dengan daerah konflik Thailand Selatan juga mencoba untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik Thailand Selatan, namun terdapat beberapa penolakan dari pihak Thailand karena Malaysia dianggap berpihak ke separatis Thailand Selatan. Pada tahun 2014 Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha membentuk sebuah komite baru untuk menyelesaikan krisis di wilayah Thailand Selatan. Terobosan pemerintah baru Thailand untuk memulai perundingan damai dengan Muslim di Thailand Selatan dengan mediasi

Malaysia<sup>14</sup>. Namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan adanya mediasi antara pemerintah Thailand dan separatis Thailand Selatan.

Diperlukannya resolusi konflik dalam menyikapi kasus yang terjadi di Thailand Selatan, karena dalam resolusi konflik itu sendiri memiliki tujuan yang baik demi terciptanya sebuah jalan yang damai antar kedua belah pihak yang bertikai agar kebutuhan masing-masing pihak yang bertikai dapat dipenuhi. Dalam hal ini sejak memanasnya kembali konflik di Thailand Selatan, menimbulkan keinginan dari Malaysia untuk membantu tetangganya tersebut untuk menyelesaikan konflik di Thailand Selatan mengingat konflik tersebut telah berlangsung lama dan belum menemukan titik temu.

Resolusi konflik bertujuan menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata. Menurut Peter Wallensteen, definisi resolusi konflik mengandung tiga unsur penting, yaitu:

1. Adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak. Kesepakatan juga dapat dilakukan secara rahasia atas permintaan pihak-pihak yang bertikai dengan pertimbangan tertentu yang sifatnya sangat subyektif.

---

<sup>14</sup>Indonesianirib, 2014. *Malaysia dan Upaya Mediasi Konflik di Thailand Selatan*. <http://indonesian.irib.ir/editorial/fokus/item/84439-malaysia-dan-upaya-memediasi-konflik-di-thailand-selatan> Diakses Pada Tanggal 04 Desember 2016 pukul 21.04 WIB

2. Setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subyek. Sikap ini sangat penting karena tanpa itu mereka tidak dapat bekerjasama selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara tuntas.
3. Pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi dan politik yang didambakan<sup>15</sup>.

Menurut Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu<sup>16</sup>:

1. *Peace-making*

Adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui fasilitasi, mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Dikaitkan dengan kasus ini pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.

2. *Peace-Keeping*

Adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga

---

<sup>15</sup>Wallensteen Peter.2002. *Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the GlobalSystem. London:Sage*, hal.8-9.

<sup>16</sup>Hermawan, Yulius. 2007. *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, Yogyakarta, Graha Ilmu,2007, hal 93

perdamaian yang netral. Menurut definisi ini, untuk konflik yang terjadi antara pemerintah Thailand dengan separatis Thailand Selatan dapat dikesampingkan karena upaya perdamaian yang dilakukan berlangsung tanpa intervensi militer manapun. Hal ini sesuai dengan ASEAN Way, yaitu kebiasaan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan dengan lebih mengedepankan upaya diplomasi, tekanan, dan pencegahan sedemikian rupa sehingga tanpa melibatkan aksi militer asing<sup>17</sup>.

### 3. *Peace-building*

Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peacebuilding* diharapkan *negative peace* (atau *theabsence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Berdasarkan tahap-tahap penyelesaian konflik diatas, Malaysia sebagai negara yang terlibat dalam penyelesaian konflik di Selatan Thailand telah melakukan tahap-tahap penyelesaian konflik seperti *peace-making* dan *peace-building*. Dalam tahap *peace-making* Malaysia berusaha untuk mempertemukan separatis Pattani dan pemerintah Thailand untuk melakukan mediasi dengan cara damai. Hal ini dapat dilihat dari seringnya Malaysia menjadi tuan rumah untuk penyelesaian konflik Selatan Thailand dan berperan menjadi fasilitator.

---

<sup>17</sup>Masilamani, Logan and Peterson Jimmy. 2014. *The "ASEAN Way": The Structural Underpinnings of Constructive Engagement*.  
<http://www.foreignpolicyjournal.com/2014/10/15/the-asean-way-the-structural-underpinnings-of-constructive-engagement/> Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2016 18.10 WIB.

Sedangkan dalam tahap *peace-building* pada penyelesaian konflik Thailand Selatan, Malaysia melakukan kerjasama-kerjasama serta membuat MoU dan naskah 3E dengan pemerintah Thailand seperti di bidang Sosial dan ekonomi untuk mensejahterakan penduduk Thailand Selatan yang mana provinsi-provinsi di Selatan Thailand merupakan salah satu provinsi termiskin dan dengan tingkat pendidikan terendah di Thailand. Hal ini ditujukan untuk meredam ketimpangan dan kecemburuan sosial serta untuk meredam separatisme di Thailand Selatan.

#### **D. Hipotesa**

Peran Malaysia sebagai fasilitator dalam upaya proses perdamaian di Thailand Selatan periode 2005-2016 yaitu :

1. Dalam upaya *peace-making*, Malaysia berhasil mempertemukan pemerintah Thailand dan pemberontak Thailand Selatan di meja perundingan.
2. Dalam upaya *peace-building*, Malaysia melakukan kerjasama dengan membuat MoU dan Naskah 3E dengan pemerintah Thailand dibidang sosial dan ekonomi di Thailand Selatan.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui sejauh mana peran Malaysia dalam upaya proses perdamaian di Thailand Selatan.
2. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Malaysia dalam upaya proses perdamaian di Thailand Selatan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian ini pun menggunakan pendekatan deskripsi analitis mengenai peran yang dilakukan Malaysia dalam upaya proses perdamaian di Thailand Selatan. Deskripsi analitis bertujuan untuk menjabarkan dan mendeskripsikan apa yang ada atau apa yang sudah ada atau menggambarkan fenomena tertentu untuk menentukan adanya keterlibatan antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya yang relevan dengan penelitian.

Hakikat penelitian bersifat deskriptif-analitis memberikan pemaparan mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif dengan menjawab pertanyaan apa, bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi dalam kontekslingkungannya. Objektivitas pun harus dijaga sedemikian rupa agar subjektivitas dalam membuat interpretasi dapat dihindari. Hal ini pun berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematis atau menyeluruh dan sistematis<sup>18</sup>. Penulis skripsi ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, melainkan pula dengan melakukan sebuah analisa serta interpretasi tentang arti kata yang digunakan. Oleh karena itu penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga setiap

---

<sup>18</sup>Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan; Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal. 92 dan 94.

pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian<sup>19</sup>.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data serta informasi di dalam penulisan skripsi ini melalui studi penelitian kepustakaan (*library resarch*). Penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitan yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis dengan cara membaca dan mempelajari yang bersumber dari buku referensi, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal, surat kabar dan majalah serta sumber resmi maupun dokumen-dokumen yang dapat menunjang penelitian ini sebagai data sekunder sebagai landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas dalam penyajian skripsi ini.

#### **H. Batasan Penelitian**

Untuk menghindari adanya pelebaran penjelasan mengenai peran Malaysia dalam proses perdamaian di Thailand Selatan maka dibutuhkan batasan penelitian. Adapun batasan penelitian ini adalah tahun 2005-2016.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Sebuah karya penelitian dapat dikatakan ilmiah atau tidak salah satunya dilihat dari sistematika penulisan. Dengan demikian penulisan yang sistematis menjadi salah satu syarat mutlak untuk kaidah penelitian yang ilmiah. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Hendarsono, Emy Susanty. 2007. Penelitian Kualitatif; Sebuah Pengantar, dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ED), *Metodelogi Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 172.

BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, batasan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II, akan membahas mengenai dinamika politik Malaysia dan politik luar negeri Malaysia terhadap konflik Thailand Selatan.

BAB III, akan membahas mengenai sejarah dan dinamika konflik yang terjadi di Thailand Selatan serta dampaknya terhadap Malaysia.

BAB IV, akan membahas mengenai berbagai upaya perdamaian yang dilakukan Malaysia terhadap konflik Thailand Selatan.

BAB V, berisi tentang rangkuman atau kesimpulan dari keseluruhan bab yang telah dibahas, serta merupakan pembahasan terakhir dan penutup skripsi.

